

**Program Ratifikasi Konvensi PBB tentang Daftar Hitam Organisasi Teroris
Di Indonesia**

Iskandar Zulkarnaen

(Dosen Prodi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Aceh)

Al Chaidar

(Dosen Prodi Antropologi, Universitas Malikussaleh Aceh)

Herdi Sahrasad

(Dosen dan Peneliti Politik Internasional Islam, Universitas Paramadina, Jakarta;
Manajemen Freedom Foundation, Jakarta)

Fauzi

(Dosen Prodi Sosiologi, Universitas Malikussaleh Aceh)

Muntasir

(Dosen Prodi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Aceh)

Eka Januar

(Dosen Prodi Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry Aceh)

Abstrak

Untuk secara efektif menangani ancaman teroris saat ini, kita harus mulai dengan cara pemahaman yang unik di mana jihadisme ternyata mendorong kekerasan, dan dilanjutkan dengan menilai mana negara-negara Barat yang memiliki kekuatan nyata sekaligus kerentanan nyata dalam pendekatan mereka terhadap terorisme. Pada dekade belakangan ini dan sejak 11 September 2001, jelas bahwa kita tidak hanya perang melawan teror tapi prinsipnya terhadap ide-ide jihad yang mengilhaminya. Dengan melihat ke belakang sejak lima tahun terakhir, dan khususnya dua tahun terakhir sejak ISIS mengumumkan khilafah, bisa dikatakan bahwa jihad jauh dari kata statis dengan berbagai ketegangan yang memiliki kecenderungan untuk beradaptasi dan berkembang. Seiring serangan yang baru-baru ini terjadi di Paris, Brussels, San Bernardino dan Orlando menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan tidak menganggap secara serius kekuatan ide jihad. Hal ini jelas terlihat ketika pemerintah AS melalui program *Countering Violent Extremism* (CVE) dari laporan *Homeland Security Advisory Council* merekomendasikan tidak menggunakan kata-kata seperti “jihad” dan “syariah,” karena takut mengobarkan sebuah

narasi “kita lawan mereka.” Padahal ancaman jihad hanya dapat benar-benar diatasi jika kita peduli untuk memahami bahwa ide-ide jihad memegang peranan dalam mendorong aksi kekerasan. Jihadisme perlu di-*packing* kembali dari konsep tradisional untuk mengeksploitasi situasi politik dunia Islam terutama di Timur Tengah. Ini berdasarkan fakta ketika ide-ide jihad secara meyakinkan berubah wujud dengan cepat menjadi ancaman fisik kinetik.

Keywords: organisasi teroris, PBB, CVE, war of ideas, jihad, listing & delisting

—Dasar Pemikiran—

Untuk mengalahkan ISIS dan untuk mempersiapkan ancaman jihad yang akan datang berikutnya, kita perlu mengubah konsep dari *counter*-ISIS yang menerapkan pendekatan pro-daerah yang akan menghilangkan skenario memvalidasi di Timur Tengah untuk ide-ide jihad. Henry Kissinger menulis profetis pada tahun 1954, “Memang benar bahwa kami melakukan upaya untuk menunjukkan nilai-nilai Barat, tapi kurang dengan apa yang kita katakan daripada apa yang kita lakukan.” Wacana keberhasilan militer koalisi saat ini masih menjadi kunci untuk mengurai daya tarik Negara Islam (ISIS). Hal ini adalah sebuah kemenangan dengan memasarkan pesan tersebut dan itu adalah penggambaran kekalahan yang membuat ISIS semakin rentan. Banyak pihak mengakui pesan yang selama beberapa bulan terakhir beredar, di mana ISIS menasihati para pengikutnya untuk mengikuti “media jihad” yang itu menjelaskan bahwa “setengah pertempuran adalah perang media.”

Jihad seperti yang kita kenal sekarang merupakan hasil tradisi intelektual (wacana) yang dikembangkan selama beberapa dekade, muncul pada sejumlah teks, kaset dan video, dan disesuaikan dengan muatan lokal dan format geopolitik masih-masing wilayah. Al Qaeda telah selama beberapa dekade dimonopoli tradisi ini dengan membangun hirarki organisasi canggih dan rahasia dan pementasan serangkaian serangan *high-profile* yang bermerek warisan. ISIS telah mengambil bentuk taktik yang sama, dengan penambahan eksploitasi ketidakstabilan regional untuk mewujudkan klaim teritorial sebagai khalifah dan negara apokaliptik.

Mengapa hal ini penting? Dengan melihat perkembangan jihad bukan sebagai urutan aksi teror tetapi sebagai evolusi dari penyebab penggunaan informasi konsep-konsep Islam klasik dan menerapkannya pada kondisi kontemporer dapat membantu memahami simpulan bahwa pandangan Barat selama ini “rabun.” Misalnya kesalahan pada sejumlah kesempatan yang hilang ketika harus menghentikan kelompok-kelompok jihad ini sebelum mengambil bentuk. Contohnya: kebijaksanaan mempersenjatai mujahidin Afghanistan (yang kemudian melahirkan “musuh” bernama Taliban), kegagalan pencegahan tragedi 9/11, kegagalan untuk memperhatikan munculnya ISIS sebelum mereka menyatakan kekhalifahan pada bulan Juni 2014. Dinamika konsistensi Barat sejauh ini telah gagal untuk menghargai kontraterorisme sebagai kekuatan ide – khususnya, seberapa luas, mendalam

dan permanen dapat didistribusikan. Dalam media sosial, Barat memiliki lanskap yang lebih luas di mana ide-ide ditransmisikan dan oleh siapa saja.

Pemikiran strategis jangka panjang tentang tantangan terorisme jihad harus dimulai dengan menerima realitas akan dua fakta. *Pertama*, kita tidak akan pernah bisa benar-benar membasmi kegiatan teroris atau terjadinya tindakan teroris (memang, aksi teroris telah dilakukan jauh sebelum Al Qaeda muncul). *Kedua*, kita tidak akan pernah bisa benar-benar mencegah semua individu untuk tidak tertarik dengan ide-ide jihad.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan proses identifikasi organisasi-organisasi teroris yang harus berlangsung secara sangat teliti dan penuh pertimbangan. Di antara negara-negara yang menerbitkan daftar organisasi teroris yang ditunjuk, beberapa memiliki prosedur yang jelas untuk daftar dan *delisting*, dan beberapa “buram.” Apa pun alasannya, anggaran sebesar apa pun tidak mampu untuk menopang sumber daya militer belaka sebagaimana birokrasi yang saat ini berlaku. Beberapa negara memiliki kebijakan *firewall* yang berbentuk kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas legal Kejaksaan Agung atau lembaga lainnya yang memiliki kekuatan hukum.

Sejak tahun 2002, Pemerintah Australia mempertahankan *listing* organisasi teroris sesuai Amandemen Undang-Undang Legislasi Keamanan terhadap Terorisme tahun 2002 tentang daftar organisasi terlarang di Australia untuk terorisme. *Listing*, *de-listing* dan *re-listing* berikut protokol melibatkan Organisasi Intelijen Keamanan Australia dan Kejaksaan Agung.

Di Kanada, sejak 18 Desember 2001, Pasal 83,05 KUHP Kanada memungkinkan Gubernur di Dewan untuk mempertahankan daftar entitas yang terlibat dalam terorisme, atau organisasi yang memfasilitasi, atau bertindak atas nama badan tersebut untuk kegiatan terorisme. Daftar Entitas Terorisme ini ditinjau oleh Menteri dan Ketua Pengadilan Federal, dan akhirnya diterbitkan dalam lembaran negara Kanada Gazette. Daftar ini juga dipublikasikan di situs Keamanan Publik Kanada.

Negara-negara di Uni Eropa bahkan memiliki daftar *outside in* dari PBB dan juga daftar Uni Eropa sendiri. Uni Eropa memiliki dua daftar organisasi teroris yang ditunjuk yang memberikan sanksi yang berbeda untuk kedua kelompok. Daftar pertama disalin dari PBB, dan yang kedua daftar otonom. Berdasarkan daftar ini, maka otoritas hukum Uni Eropa memiliki kekuatan untuk melakukan pembekuan semua dana, aset keuangan lainnya dan sumber daya ekonomi kelompok teroris. Daftar ini juga memiliki kekuatan larangan langsung atau tidak langsung terkait dana, aset keuangan lainnya dan sumber daya ekonomi yang tersedia. Penting untuk dicatat bahwa sanksi hanya berlaku untuk kelompok Uni Eropa, sementara negara-negara eksternal terlepas dari penunjukan daftar ini. Misalnya, 47 kelompok terdaftar sebagai organisasi teroris di Uni Eropa, tetapi sanksi hanya berlaku untuk 27 organisasi teror yang beroperasi di wilayah hukum Uni Eropa. Negara anggota memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme tapi ini adalah satu-satunya tindakan yang mengikuti penunjukan sebuah organisasi internal di Uni Eropa. Hasilnya ternyata, daftar Uni Eropa tentang kelompok

teroris dan individu, 25 Juni 2012 memiliki kekuatan hukum yang kuat tidak hanya di lembaga penegakan hukum, namun juga di masyarakat. Yang menarik di sini adalah bahwa proses daftar organisasi baru ditambahkan ke daftar otonom mengikuti proses yang hati-hati dan serius: (1) Identifikasi: Negara-negara anggota dan negara-negara pihak ketiga memberi daftar tentang sebuah organisasi. Negara ini harus memiliki bukti kuat dan harus dikirim oleh otoritas nasional, (2) *Scrutiny*: Presiden, atau delegasi, mengumpulkan informasi dasar, dan mungkin memerlukan informasi lebih lanjut dari negara, (3) Konsultasi: Informasi dibagi kepada negara-negara anggota lainnya untuk diskusi. Semuanya masih rahasia. 15 hari setelah delegasi dari negara-negara bertemu maka penitia kerja menghasilkan *output* dan *outcome*, Europol kadang-kadang diundang juga, (4) Rekomendasi: mempersiapkan keputusan daftar, (5) Keputusan Dewan Uni Eropa: Dewan mengadopsi daftar. Keputusan harus bulat, yang berarti bahwa setiap negara memiliki hak veto, (6) Penerbitan Resmi: Di Uni Eropa ada lembaran Resmi yang mencatat keputusan eksekutif untuk masalah-masalah genting dan serius yang membutuhkan penanganan segera, (7) Pemberitahuan dan Pernyataan Alasan: Dewan Sekretariat memberitahu setiap organisasi yang ditunjuk melalui surat, bersama-sama dengan petunjuk tentang cara untuk mendapatkan keputusan untuk dipertimbangkan kembali. Daftar ini juga memiliki mekanisme atau proses *delisting* (mengeluarkan suatu organisasi atau individu dari daftar organisasi terlarang). Uni Eropa memiliki proses yang sama untuk meninjau daftar, dan untuk menghilangkan organisasi dari daftar.

India juga memiliki daftar organisasi terlarang sebagai *firewall* untuk mengantisipasi masuknya organisasi-organisasi “aneh” ke dalam negeri mereka. Di bawah Undang Undang (Pencegahan) Hukum Kegiatan Melanggar, Departemen Dalam Negeri menyimpan daftar organisasi terlarang oleh Pemerintah India. Di Republik Rakyat Cina, Kementerian Keamanan Publik menyimpan daftar organisasi teroris di situs mps.gov.cn. Daftar ini telah diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Amerika Serikat pada www.china-embassy.org.

Di Rusia terdapat daftar tunggal federal organisasi yang dianggap sebagai teroris oleh Mahkamah Agung Federasi Rusia. Di Ukraina juga memiliki daftar organisasi terlarang untuk kebutuhan politik domestik mereka sendiri. Di Ukraina, Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. Pihak berwenang Ukraina mengklaim bahwa kedua organisasi terdiri dari hierarki yang kaku, pembiayaan saluran dan pasokan senjata dengan tujuan sengaja menyebarkan kekerasan, mengambil sandera, melaksanakan kegiatan subversif, pembunuhan, dan intimidasi warga.

PBB tidak memiliki daftar umum dari semua organisasi teroris. Sebaliknya, PBB memiliki beberapa daftar yang berfokus pada konteks tertentu. PBB 1267 daftar rezim difokuskan pada Al-Qaeda, Taliban dan rekan-rekan mereka. Berdasarkan daftar ini, maka negara-negara PBB harus mematuhi larangan penjualan atau pengalihan senjata dan bahan-bahan terkait; pembekuan dana dan aset keuangan atau sumber lain; pencegahan masuknya ke atau transit melalui wilayah negara-negara anggota; larangan pemberian bantuan teknis atau pelatihan dalam hal-hal militer atau dalam pembuatan atau pemeliharaan senjata dan

bahan-bahan terkait. Uni Eropa memberikan pengecualian untuk pelaksanaan sanksi aset-pembekuan yang relevan per resolusi PBB 1452 (2002). Atas permintaan, otoritas nasional yang kompeten dapat menentukan untuk melepaskan dana dengan alasan jika, dalam batas waktu yang disediakan belum ada keberatan dibuat, atau rilis secara tegas disetujui, oleh Komite Sanksi PBB. Daftar ini diperlukan untuk menutupi biaya dasar, dimaksudkan untuk pembayaran biaya profesional untuk jasa hukum atau untuk pembayaran biaya atau jasa dalam kaitannya dengan pemeliharaan dana beku atau aset yang diperlukan untuk biaya program kemanusiaan.

Pemerintah Inggris memiliki daftar kelompok teroris terlarang. Teks UU Terorisme 2000 yang berlaku (termasuk amandemennya) di Britania Raya, dari Database Statuta Hukum Inggris. Di Yugoslavia dan Serbia, pihak berwenang Serbia und Yugoslavia menganggap bahwa Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) sebagai kelompok teroris dan memasukkannya ke dalam daftar organisasi terlarang.

Strategi kontra wacana terorisme ini mungkin akan menjadi langkah efektif terakhir bagi matinya organisasi, entitas atau *sodalitas* dan individu yang terkait dengan terorisme, dan semoga strategi ini menjadi langkah pertama dalam strategi pro-regional yang dapat mengekang ancaman jihad selama abad dua puluhan. Pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang membahas ide bagaimana jihad mengeksploitasi kerentanan politik di Timur Tengah untuk menginspirasi kekerasan main hakim sendiri di Indonesia. Tidak seperti paparan kami saat ini tentang terorisme di hadapan "komunitas ketahanan" dan berharap *think-tank* negara tidak bersikap eufimistis terhadap strategi pro-regional untuk kontra-terorisme yang juga akan menghubungkan paparan kami tentang radikalisasi domestik untuk perencanaan stabilitas politik di Indonesia. Akan lebih baik jika kita mempersiapkan diri untuk skenario hari-setelah setelah ISIS akhirnya dirampingkan menjadi hanya milisi seperti yang lain. Dengan asumsi sebelumnya tentang adaptasi dari ide-ide jihad, seperti strategi pro-regional untuk kontra-terorisme membuat Amerika Serikat lebih lincah dalam politik, pertahanan fisik dan media lanskap dengan mengantisipasi bagaimana kelompok teroris mengeksploitasi konflik politik.

Meskipun daftar Organisasi Teroris Asing memiliki seperangkat kriteria untuk menunjuk kelompok, ada sedikit kejelasan dalam praktek tentang proses pencabutan. Bahkan setelah organisasi telah meninggalkan terorisme selama bertahun-tahun, sebutan mereka bertahan tanpa penjelasan yang jelas, dan didasarkan pada asumsi bahwa kekerasan historis menunjukkan potensi masa depan. Pada November 2007 terbit sebuah putusan pengadilan oleh terlarang Organisasi Komisi Banding Inggris (*Proscribed Organizations Appeals Commission*, POAC) memerintahkan pemerintah Inggris untuk menghapus Mujahidin Rakyat Iran – dikenal dengan sebutan Mujahidin-e Khalq (MEK) - dari daftar organisasi teroris. Keputusan ini, bersama dengan keputusan yang sama oleh Pengadilan Eropa Tingkat Pertama (Pengadilan Eropa tingkat bawah), dan tinjauan wajib sebutan kelompok oleh Departemen Luar Negeri AS pada bulan Oktober 2008, memberikan kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana teroris penunjukan dinilai. Menurut Reformasi Intelijen 2004 dan Perlindungan Aksi Terorisme, jika ada ulasan penunjukan dilakukan

selama periode lima tahun, sekretaris AS negara harus menentukan apakah pencabutan (*delisting*) adalah tepat.

—Metode Pembuatan Profil dan Daftar Organisasi Teroris—

Setiap *review* penunjukan harus didasarkan hanya pada isu-isu terorisme, tidak semata-mata hanya menuruti pandangan pemerintah terhadap organisasi yang bersangkutan. Jika keputusan untuk menunjuk kelompok dibuat pada pertimbangan kebijakan luar negeri daripada bukti, maka daftar akan dicap sebagai alat politik, sehingga mengurangi utilitas sebagai alat untuk mendorong pemerintah lainnya untuk mengambil tindakan terhadap organisasi teroris tertentu. Inilah yang terjadi pada daftar negara terorisme-mensponsori, yang hanya terlihat seperti satu set negara pemerintah AS tidak suka.

Dalam kasus MEK ini, peruntukannya tidak harus didasarkan pada sikap politik kelompok atau kekhawatiran tentang AS-Iran hubungan, atau harus itu menjadi hadiah untuk laporan pada kegiatan nuklir Iran. Selama tiga tahun terakhir, Laporan Negara Departemen Luar Negeri Terorisme telah dikutip tidak ada kegiatan teroris MEK dugaan sejak tahun 2001, namun telah meningkat tuduhan yang berkaitan kegiatan non-teroris kelompok. Edisi 2007 dari Laporan, akan keluar pada akhir April 2008, terikat untuk melanjutkan tren ini.

Tuduhan ini - dukungan untuk pengambilalihan kedutaan AS di Teheran pada tahun 1979, kesetiaan kepada Islam Marxisme, penindasan Irak Kurdi dan Syiah, partisipasi dalam minyak untuk skandal makanan, dan bakar diri pendukungnya selama protes - tidak terkait dengan kriteria hukum untuk penunjukan teroris dan mungkin dimaksudkan untuk mendiskreditkan MEK. Tuduhan-tuduhan ini tidak relevan, dan beberapa juga didasarkan pada bukti contestable. Contoh ini dari informasi yang tidak relevan memperkuat kebutuhan untuk Departemen Luar Negeri untuk membuat pedoman eksplisit oleh yang bergerak grup dari sebutan untuk pencabutan (*delisting*).

Sejarah berperan penting dalam penunjukan teroris, terutama ketika mempertimbangkan kelompok yang tidak lagi berpartisipasi dalam aktivitas kekerasan. Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization, PLO) adalah salah satu contohnya. PLO jelas digunakan untuk menjadi kelompok teroris, tapi sekarang menikmati hubungan baik dengan Amerika Serikat. Karena PLO mematuhi 1993 Deklarasi Prinsip dan meninggalkan terorisme, organisasi ini tidak terdaftar di edisi pertama Daftar Organisasi Asing Teroris Departemen Luar Negeri dari di tahun 1997 dari daftar terorisme Timur Tengah. Karena evaluasi ulang penunjukan PLO mendahului penciptaan daftar Departemen Luar Negeri dan

undang-undang berikutnya mengatur proses review, kasus PLO memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana pencabutan akan terjadi di bawah sistem saat ini.

Sebaliknya, putusan POAC November 2007 adalah contoh yang lebih baru dan relevan dari ulasan sebutan teroris. Bahkan, POAC halaman 144 berkuasa membahas tindakan historis dari MEK secara rinci. Mengenai tujuh tahun terakhir, POAC menemukan, bahwa: apapun karakterisasi akurat dari kegiatan organisasi antara tahun 1980 dan 2001, posisi pada 2006-2007 secara radikal berbeda, dan telah begitu sejak tahun 2001 ... MEK telah dilakukan tidak ada kegiatan militer apapun sejak sekitar Agustus 2001, apakah di Iran atau di tempat lain di dunia ... Hal ini disebabkan keputusan yang disengaja dari [MEK] dibuat pada kongres luar biasa diadakan di Irak pada bulan Juni 2001, yaitu, untuk meninggalkan semua aksi militer (atau kegiatan) di Iran ... Tidak ada bukti bahwa [MEK] memiliki setiap saat sejak tahun 2003 berusaha untuk menciptakan kembali bentuk struktur yang mampu melaksanakan atau mendukung aksi terorisme. Tidak ada bukti dari setiap upaya untuk "mempersiapkan" untuk terorisme. Tidak ada bukti dari dorongan kepada orang lain untuk melakukan tindakan terorisme Faktor di atas, dikombinasikan dengan 5 tahun yang sejak berlalu sejak musim panas 2001, menuntut kesimpulan yang terus pengasingan tidak bisa secara sah dibenarkan.

Melekat dalam rangka POAC untuk mencabut penunjukan MEK ini - perintah pemerintah Inggris adalah menarik - tiga prinsip: keputusan resmi organisasi untuk meninggalkan kekerasan, penghentian kegiatan teroris, dan periode lima tahun perdamaian. Mungkin Departemen Luar Negeri tidak ingin menggunakan prinsip-prinsip tertentu ketika mengevaluasi ulang penunjukan teroris kelompok, tetapi harus mengadopsi seperangkat pedoman dan menjelaskan kepada publik. Hal ini juga harus menjelaskan bagaimana hal itu berlaku prinsip-prinsip dalam setiap kasus; jika MEK ditunjuk, beberapa alasan tertentu harus diberikan. Lebih disukai, Departemen Luar Negeri harus memberikan peta jalan untuk apa kelompok yang ditunjuk harus lakukan untuk dihapus dari daftar. Untuk MEK, apa, jika ada, harus ia lakukan untuk menunjukkan itu telah meninggalkan terorisme dalam praktek serta dalam teori.

Sementara Departemen Luar Negeri secara rutin dipulihkan penunjukan MEK sebagai kelompok teroris pada tanggal 8 April, ia harus melakukan lebih formal dan kajian mendalam oleh Oktober 2008. Keputusan itu ulasan ini harus didasarkan pada dua faktor. Pertama, Departemen Luar Negeri hanya harus memutuskan jika grup tersebut atau tidak kelompok teroris, dan tidak membawa informasi yang tidak relevan. Kriteria yang harus digunakan dalam cara yang profesional berisi, mengandalkan bukti daripada prasangka atau rumor.

Kedua, keputusan harus didasarkan pada yang jelas aturan mengenai bagaimana pemerintah AS mencabut semacam ini penunjukan. Saat ini, tampaknya bahwa kegiatan

teroris masa lalu – tidak peduli berapa lama atau jauh – yang rentan terhadap ditafsirkan sebagai bukti potensi masa depan, akibatnya membenarkan penunjukan lanjutan grup ini. Sebaliknya, POAC telah menetapkan maju beberapa prinsip yang berguna untuk mengevaluasi masa lalu kekerasan organisasi dan sekarang damai; pemerintah AS harus melakukan hal yang sama.

Untuk secara efektif menangani ancaman teroris saat ini, kita harus mulai dengan mengakui cara yang unik di mana jihadisme mendorong kekerasan, dan dilanjutkan dengan menilai mana negara-negara Barat memiliki kekuatan nyata dan kerentanan nyata dalam pendekatan mereka. Dengan belakang dekade dan setengah sejak 11 September 2001, jelas bahwa perang kita tidak hanya melawan teror tapi prinsipnya terhadap ide-ide jihad yang mengilhami itu. Dengan melihat ke belakang dari lima tahun terakhir, dan khususnya dua tahun terakhir sejak Negara Islam mengumumkan khilafah, kita bisa juga dengan aman mengatakan bahwa jihad adalah jauh dari statis – memang, berbagai strain yang memiliki kecenderungan untuk beradaptasi dan berkembang.

Seiring serangan baru-baru ini di Paris, Brussels, San Bernardino dan Orlando menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan tidak menganggap serius kekuatan ide jihad. Memang, ini jelas dari menggelepar pemerintah AS Melawan Kekerasan Ekstrimisme (CVE) program dan diperkuat dalam Departemen terbaru dari laporan Homeland Security Advisory Council merekomendasikan tidak menggunakan kata-kata seperti “jihad” dan “syariah” karena takut mengobarkan sebuah “kita lawan mereka” narasi. Ancaman jihad hanya dapat diatasi dengan jujur dan benar-benar jika kita peduli untuk memahami kekuatan bahwa ide-ide jihad memegang dalam mendorong aksi kekerasan. Jihadisme repackages konsep tradisional untuk mengeksploitasi situasi politik di Timur Tengah. Ini adalah ketika ide-ide jihad melakukannya meyakinkan bahwa mereka dengan cepat berubah menjadi ancaman fisik kinetik.

Untuk mengalahkan ISIS dan untuk mempersiapkan ancaman jihad yang datang berikutnya, kita perlu mengubah dari counter-ISIS untuk pendekatan pro-daerah yang menghilangkan skenario memvalidasi di Timur Tengah untuk ide-ide jihad. Bahan utama adalah gudang kami yang unik, dan keberhasilan kami dalam mengalahkan ISIS baik di rumah dan di medan perang akan tergantung pada seberapa efektif kita berkomunikasi fakta bahwa militer kita tidak hanya berlaku untuk melancarkan perang tetapi juga untuk melancarkan stabilitas. Seperti Henry Kissinger menulis profetis pada tahun 1954, “Memang benar bahwa kami adalah sebuah upaya untuk menunjukkan nilai-nilai Barat, tapi kurang dengan apa yang kita katakan daripada apa yang kita lakukan.” Keberhasilan militer kita saat ini adalah kunci untuk mengurai daya tarik Negara Islam. Ini adalah kemenangan ini bahwa kita dapat memasarkan di pesan kami, dan itu adalah penggambaran ini kekalahan yang membuat

Negara Islam paling rentan. Memang, kelompok mengakui banyak saat pesan yang selama beberapa bulan terakhir, di mana ia menasihati para pengikutnya untuk upah “media jihad,” menjelaskan bahwa “setengah pertempuran adalah perang media.”

—Tujuan Program—

Jihad seperti yang kita kenal sekarang merupakan tradisi intelektual yang dikembangkan selama beberapa dekade, muncul di sejumlah teks, kaset dan video, dan disesuaikan dengan muatan lokal dan format geopolitik masih-masing wilayah. Al Qaeda telah selama beberapa dekade dimonopoli tradisi ini melalui membangun hirarki organisasi canggih dan rahasia dan pementasan serangkaian serangan high-profile yang bermerek warisan. Negara Islam telah mengambil bentuk melalui taktik yang sama, dengan penambahan mengeksploitasi ketidakstabilan regional untuk mewujudkan klaim teritorial sebagai khalifah dan negara apokaliptik.

—Signifikansi Program—

Mengapa ini penting? Melihat perkembangan jihad bukan sebagai urutan aksi teroris tetapi sebagai evolusi dari penyebab diinformasikan oleh kedua penggunaan konsep-konsep Islam klasik dan menerapkannya dengan keadaan kontemporer dapat membantu kita mengambil stok di mana penilaian kami rabun. Satu dapat menunjuk jari di sejumlah kesempatan yang hilang yang kita mungkin harus menghentikan kelompok-kelompok ini mengambil bentuk. Ini termasuk kebijaksanaan mempersenjatai mujahidin Afghan, upaya untuk mencegah tragedi 9/11 atau kegagalan untuk memperhatikan munculnya Negara Islam sebelum mereka menyatakan kekhalifahan mereka pada bulan Juni 2014. Namun, dinamika konsisten tunggal kita telah gagal untuk menghargai sejauh kontraterorisme optik kami pergi adalah kekuatan ide – khususnya, seberapa luas, mendalam dan permanen mereka dapat didistribusikan. Dalam usia media sosial, kita memiliki lanskap yang lebih luas di mana ide-ide ditransmisikan dan oleh siapa.

Pemikiran strategis jangka panjang kita tentang tantangan terorisme jihad harus dimulai dengan menerima dua tempat. Pertama, kita tidak akan pernah bisa benar-benar membasmi kegiatan teroris atau terjadinya tindakan teroris (memang, aksi teroris telah dilakukan jauh sebelum Al Qaeda muncul). Kedua, kita tidak akan pernah bisa benar-benar mencegah semua individu dari yang tertarik dengan ide-ide jihad. Selama sarana untuk kehancuran dan pembenaran untuk itu ada, sehingga akan kemungkinan kekerasan seseorang melakukan atas nama ide-ide. Dalam menggambarkan ancaman senjata nuklir, Thomas Schelling mengingatkan kita bahwa “Salah satu prinsip menyedihkan produktivitas manusia adalah bahwa lebih mudah untuk menghancurkan selain menciptakan.... Kerugian yang orang bisa

melakukannya, atau bahwa negara dapat lakukan, adalah mengesankan. Dan itu sering digunakan untuk mengesankan.” Dengan dua asumsi ini dalam rangka, kita sekarang dapat memegang sebuah kaca pembesar untuk percakapan kebijakan kami saat ini tentang bagaimana untuk menghentikan terorisme jihad diri radikal.

—Proses Pembuatan Profil dan Daftar Organisasi Teroris—

Proses identifikasi organisasi harus berlangsung secara sangat teliti dan penuh pertimbangan. Di antara negara-negara yang menerbitkan daftar organisasi teroris yang ditunjuk, beberapa memiliki prosedur yang jelas untuk daftar dan delisting, dan beberapa yang buram. Kami berpendapat bahwa kondisi delisting buram mengurangi insentif bagi organisasi untuk meninggalkan terorisme, sementara bahan bakar radikalisme. Berdasarkan hukum fisika Newton, dimana setiap tindakan memiliki reaksi yang sama dan berlawanan. Desakan oleh beberapa komunitas di pemerintah yang beroperasi di dalam CVE (*Counter Violent Extremism*) atau “kontra-radikalisasi” ruang bahwa hal ini terjadi adalah, di terbaik, hasil altruisme naif dan, paling buruk, kebodohan hubristic. Apa pun alasannya, anggaran kami dan keamanan nasional tidak mampu untuk menginvestasikan sumber daya dalam belaka birokrasi back-menepuk sebagai hal-hal yang saat ini berdiri. Setelah kami pindah dari pendekatan tindakan atau reaksi ini, kita bisa mulai memahami fitur yang benar-benar membedakan bagaimana ide-ide dapat mempengaruhi individu untuk secara independen meradikalisasi orang.

Beberapa negara memiliki kebijakan *firewall* yang berbentuk kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas legal Kejaksaan Agung atau lembaga lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2002, Pemerintah Australia mempertahankan Listing organisasi teroris sesuai Amandemen Undang-Undang Legislasi Keamanan terhadap Terorisme tahun 2002 tentang Daftar organisasi terlarang di Australia untuk terorisme.. Listing, de-listing dan re-listing berikut protokol yang terutama melibatkan Organisasi Intelijen Keamanan Australia dan Kejaksaan Agung.

Di Kanada, sejak 18 Desember 2001, Pasal 83,05 KUHP Kanada memungkinkan Gubernur di Dewan untuk mempertahankan daftar entitas yang terlibat dalam terorisme, atau organisasi yang memfasilitasi, atau bertindak atas nama badan tersebut untuk kegiatan terorisme. Daftar Entitas Terorisme ini ditinjau oleh Menteri dan Ketua Pengadilan Federal, dan akhirnya diterbitkan dalam lembaran negara Kanada Gazette. Daftar ini juga dipublikasikan di situs Keamanan Publik Kanada.

Di Uni Eropa bahkan memiliki daftar *outside in* dari PBB dan juga daftar Uni Eropa Sendiri. Uni Eropa memiliki dua daftar organisasi teroris yang ditunjuk yang memberikan sanksi yang berbeda untuk kedua kelompok. Daftar pertama disalin dari PBB, dan yang kedua adalah daftar otonom. Berdasarkan daftar ini, maka otoritas hukum Uni Eropa memiliki kekuatan untuk melakukan pembekuan semua dana, aset keuangan lainnya dan sumber daya ekonomi kelompok teroris. Daftar ini juga memiliki kekuatan larangan

langsung atau tidak langsung membuat dana, aset keuangan lainnya dan sumber daya ekonomi yang tersedia. Penting untuk dicatat bahwa sanksi hanya berlaku untuk kelompok Uni Eropa, sementara negara-negara eksternal terlepas dari penunjukan daftar ini. Misalnya, 47 kelompok terdaftar sebagai organisasi teroris di Uni Eropa, tetapi sanksi hanya berlaku untuk 27 organisasi teror yang beroperasi di wilayah hukum Uni Eropa. Negara anggota memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme tapi ini adalah satu-satunya tindakan yang mengikuti dari penunjukan sebuah organisasi Uni Eropa-internal. Ternyata, daftar Uni Eropa tentang kelompok teroris dan individu, 25 Juni 2012 memiliki kekuatan hukum yang kuat tidak hanya di lembaga penegakan hukum, namun juga di masyarakat.

Yang menarik di sini adalah bahwa proses daftar organisasi baru ditambahkan ke daftar otonom mengikuti proses yang hati-hati dan serius: (1) Identifikasi: Negara-negara anggota dan negara-negara pihak ketiga tips tentang sebuah organisasi. Negara ini harus memiliki bukti kuat dan harus ujung harus dikirim oleh otoritas nasional. (2) Scrutinity: Presiden, atau delegasi, mengumpulkan informasi dasar, dan mungkin memerlukan informasi lebih lanjut dari negara. (3) Konsultasi: Informasi dibagi dengan negara-negara anggota lainnya untuk diskusi. Semuanya masih rahasia. 15 hari setelah delegasi dari negara-negara bertemu maka penitia kerja menghasilkan output dan outcome, Europol kadang-kadang diundang juga. (4) Rekomendasi: mempersiapkan keputusan daftar. (5) Keputusan Dewan Uni Eropa: Dewan mengadopsi daftar. Keputusan harus bulat, yang berarti bahwa setiap negara memiliki hak veto. (6) Penerbitan Resmi: Di Uni Eropa ada lembaran Resmi yang mencatat keputusan eksekutif untuk masalah-masalah genting dan serius yang membutuhkan penanganan segera. (7) Pemberitahuan dan Pernyataan Alasan: Dewan Sekretariat memberitahu setiap organisasi yang ditunjuk melalui surat, bersama-sama dengan petunjuk tentang cara untuk mendapatkan keputusan untuk dipertimbangkan kembali. Daftar ini juga memiliki mekanisme atau proses delisting (mengeluarkan suatu organisasi atau individu dari daftar organisasi terlarang). Uni Eropa memiliki proses yang sama untuk meninjau daftar, dan untuk menghilangkan organisasi untuk daftar.

Di India pun memiliki daftar organisasi terlarang sebagai *firewall* untuk mengantisipasi masuknya organisasi-organisasi aneh ke dalam negeri mereka. Di bawah Undang Undang (Pencegahan) Hukum Kegiatan Melanggar , Departemen Dalam Negeri menyimpan daftar organisasi terlarang. Daftar organisasi terlarang oleh Pemerintah India. Di Republik Rakyat Cina, Kementerian Keamanan Publik menyimpan daftar organisasi teroris di mps.gov.cn. situsnya Daftar ini telah diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Amerika Serikat pada www.china-embassy.org.

Di Rusia terdapat daftar tunggal federal organisasi diakui sebagai teroris oleh Mahkamah Agung Federasi Rusia. Di Ukraina juga memiliki daftar organisasi terlarang untuk kebutuhan politik domestik mereka sendiri. Di Ukraina, Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. berwenang Ukraina mengklaim bahwa kedua organisasi terdiri dari hierarki yang kaku, pembiayaan saluran dan pasokan senjata

dengan tujuan sengaja menyebarkan kekerasan, mengambil sandera, melaksanakan kegiatan subversif, pembunuhan, dan intimidasi warga.

PBB tidak memiliki daftar umum dari semua organisasi teroris. Sebaliknya, ia memiliki beberapa daftar yang berfokus pada konteks tertentu. PBB 1267 daftar rezim difokuskan pada Al-Qaeda, Taliban dan rekan-rekan mereka. Berdasarkan daftar ini, maka negara-negara PBB harus mematuhi larangan penjualan atau pengalihan senjata dan bahan-bahan terkait; pembekuan dana dan aset keuangan lain atau sumber; pencegahan masuknya ke atau transit melalui wilayah negara-negara anggota; larangan pemberian bantuan teknis atau pelatihan dalam hal-hal militer atau dalam pembuatan atau pemeliharaan senjata dan bahan-bahan terkait. Uni Eropa memberikan pengecualian untuk pelaksanaan sanksi aset-pembekuan yang relevan per resolusi PBB 1452 (2002). Atas permintaan, otoritas nasional yang kompeten dapat menentukan untuk melepaskan dana dengan alasan berikut jika, dalam batas waktu yang disediakan untuk, belum ada keberatan dibuat, atau rilis secara tegas disetujui, oleh Komite Sanksi PBB. Daftar ini diperlukan untuk menutupi biaya dasar, dimaksudkan untuk pembayaran biaya profesional untuk jasa hukum atau untuk pembayaran biaya atau jasa dalam kaitannya dengan pemeliharaan dana beku atau aset diperlukan untuk biaya program kemanusiaan.

Di Inggris Raya, Pemerintah Inggris memiliki daftar kelompok teroris terlarang.

Teks UU Terorisme 2000 yang berlaku hari ini (termasuk amandemennya) di Britania Raya, dari Database Statuta Hukum Inggris. Di Yugoslavia dan Serbia, pihak berwenang Serbia und Yugoslavia menganggap bahwa Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) sebagai kelompok teroris dan memasukkannya ke dalam daftar organisasi terlarang.

—Bentuk Kegiatan Program Pembuatan Profil Organisasi Teroris—

Pada intinya, percakapan kebijakan CVE diinformasikan oleh asumsi cacat yang mengecilkan kekuatan ide. Contoh ini termasuk berbicara poin dari dokter konsultasi; “Off-ramping” atau perlahan-lahan mengambil individu dari proses radikalisi, seperti yang didirikan praktek dengan penyapihan individu jauh dari penyalahgunaan zat; dan “membangun kepercayaan” dengan masyarakat lokal, melalui inisiatif seperti acara antar agama dan kegiatan masyarakat yang berorientasi.

Jangan salah: ini semua inisiatif penting sebagai tujuan dalam dan dari diri mereka sendiri. Namun, mereka semua menyiratkan bahwa ide-ide jihad tidak penjelasan. Selain itu, karena asumsi Newtonian mereka tentang bagaimana mempengaruhi ide-ide, ada dua alasan mengapa ini tidak efektif dalam membatasi daya tarik ISIS dan kelompok jihad lainnya. Yang pertama adalah bahwa lebih kita masuk ke menyelidiki berbagai faktor tersebut, semakin kita menyadari bahwa mereka adalah katalis belaka dan tidak penyebab. Dengan kata lain,

kita harus tetap fokus pada memerangi tarik terhadap ideologi Islam radikal daripada mengobati faktor dorongan lebih sulit dipahami pribadi dan sosial.

Yang kedua, dan lebih kritis, pengawasan adalah bahwa tidak satupun dari inisiatif ini memperhitungkan fenomena asing tempur yang unik untuk pertumbuhan ISIS ini: janji utopia Sunni di Irak dan Suriah yang ada sebagai entitas teritorial yang sebenarnya. Semakin lama beberapa analis dan masyarakat kebijakan aneh meninggalkan memerangi ISIS di Irak dan Suriah dari percakapan dalam melawan ekstremisme kekerasan domestik, semakin jauh kita pergi dari benar-benar mengatasi akar penyebab tunggal wajah unik radikalisis jihad hari ini – janji kepahlawanan di medan perang Islam. Delusi ini keagungan militer akan ada selama teater perang sektarian apokaliptik ada. Dalam bahasa kebijakan, ruang ini diciptakan dalam kondisi politik yang penuh gejolak di Timur Tengah. Negara Islam akan tetap godaan selama tidak hanya menyebabkan mereka untuk pertempuran, tetapi juga penampilan mereka sukses, tetap. Oleh karena itu, untuk menghentikan radikalisis jihad, kita perlu berhati-hati tentang bagaimana peristiwa di Timur Tengah menginspirasi aktivisme luar negeri.

Dengan memahami dampak dari Irak dan Suriah pada ekstremisme kekerasan homegrown, kita dapat lebih produktif memikirkan ide-ide tidak seperti fisika tetapi sebagai kimia. Irak dan Suriah yang pelarut untuk memungkinkan argumentasi teologis untuk membenarkan kekerasan. Tugas kita tidak boleh untuk linear membalikkan proses radikalisis, melainkan untuk mengisolasi elemen yang akan membuat koktail bahan kimia terutama mematikan. Dalam hal kebijakan, maka, kita perlu fokus pandangan kami pada ruang-ruang di mana senyawa mematikan ide datang bersama-sama dan untuk mengontrol kondisi yang akan mencegah mereka menjadi ancaman. Untuk melakukannya, kita harus melihat mabuk apa ancaman jihad global abad kedua puluh satu akan terlihat seperti.

—Bentuk Kegiatan Program Pembuatan Daftar Organisasi Teroris—

Mari kita kembali ke dua asumsi yang kita buat sebelumnya. *Pertama*, Negara Islam adalah gejala dan bukan penyebab. *Kedua*, di mana kedua sarana untuk menimbulkan kekerasan dan pembenaran untuk itu ada, kekerasan yang dilakukan atas nama ide akan ada juga.

Jihadis tidak terkecuali ke tempat ini, dan pada kenyataannya seluruh kisah Negara Islam hanya itu. Sedangkan khusus dari proyek yang berbeda (klaim ke wilayah dan khilafah dan narasi apokaliptik), juga telah mengikuti lintasan jihad selama abad terakhir mendefinisikan ulang dan rebranding konsep tradisional sebagai solusi untuk krisis politik. rebranding jihad

ini akan berlangsung pada media apapun yang tersedia dan akan menjadi jauh lebih efektif bila divalidasi di lapangan.

Sejumlah fitur yang membedakan dari jihad di abad kedua puluh satu: (1) mobilitas Media sosial. Penggunaan media sosial oleh kelompok-kelompok jihad telah didokumentasikan dengan baik dan dibahas. Selain pesan dipromosikan pada platform ini, ini akan digunakan sebagai tangga mobilitas untuk tingkat yang lebih rendah (mungkin kurang canggih, kurang keturunan baik) aspiran jihad untuk merek sendiri dan muncul sebagai otoritas jihad, apakah karena penguasaan teks-teks tertentu atau untuk kemampuan dokumenter tertentu atau, masih, karena kualitas jurnalistik mereka. Singkatnya, media sosial tidak hanya akan menjadi panggung yang skenario jihad yang bertindak keluar, tetapi juga di mana dramawan jihad baru dan direksi akan muncul. (2) penguasaan teritorial. jihadis Tidak lagi akan dapat hanya membuat kasus untuk pengikut mereka melalui belaka teror. Sebaliknya, kelompok yang paling sukses mengambil bentuk akan entah bagaimana menarik ide jihad mereka dengan penyebab teritorial - apakah penyebab sektarian di Irak dan Suriah, sebagai ISIS dan kelompok Suriah seperti Ahrar al-Sham dan Jabhat al-Nusra lakukan, atau berpotensi untuk divisi etnis (seperti Amazigh di Afrika Utara) atau kesukuan. Singkatnya, semakin serangan pada musuh jauh (Amerika Serikat, Eropa) akan dibenarkan dalam nama penyebab lokal dan teritorial terikat.

Perbandingan untuk pemuda dan penyediaan kesempatan non-pertempuran. Salah satu fitur unik dari ISIS adalah daya tariknya di antara demografi jelas muda. Memang, itu adalah janji tidak hanya kemenangan medan perang dan mati syahid tetapi juga, ironisnya, kasus untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih "Islam" di wilayah-wilayah di bawah kendali mereka bahwa mereka berjanji untuk anggota baru. Kita perlu memperhatikan cara yang unik di mana ide-ide tidak hanya menarik dengan penyebab, tetapi juga dikemas untuk basis konsumen yang spesifik: pemuda mencari peluang untuk kemajuan.

terorisme teknologi. Karena demografi jelas muda pejuang masa depan, ancaman teroris mereka akan menimbulkan akan berlangsung pada platform teknologi dan ruang yang mereka menguasai. Ini termasuk tidak hanya hacking, tetapi juga perang cyber dan penggunaan jahat dari aplikasi mobile, antara lain. keamanan cyber akan semakin menjadi baris pertama pertahanan dalam menjaga keamanan nasional.

—Penutup—

Strategi kontra-ISIS ini mungkin akan menjadi langkah efektif terakhir bagi matinya organisasi, entitas atau sodalitas dan individu yang terkait dengan terorisme, dan semoga strategi ini menjadi langkah pertama dalam strategi pro-regional yang dapat mengekang ancaman jihad-abad dua puluh. Pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang membahas ide bagaimana jihad mengeksploitasi kerentanan politik di Timur Tengah untuk menginspirasi kekerasan main hakim sendiri di Indonesia. Tidak seperti paparan kami saat ini tentang terorisme di hadapan "komunitas ketahanan" dan berharap think-tank negara tidak bersikap eufimistis terhadap strategi pro-regional untuk kontra-terorisme yang juga akan menghubungkan paparan kami tentang radikalisasi domestik untuk perencanaan stabilitas politik di Indonesia. Akan lebih baik jika kita mempersiapkan diri untuk skenario hari-setelah setelah ISIS akhirnya dirampingkan menjadi hanya milisi lain. Dengan asumsi sebelumnya tentang adaptasi dari ide-ide jihad, seperti strategi pro-regional untuk kontra-terorisme membuat Amerika Serikat lebih lincah dalam politik, pertahanan fisik dan media lanskap dengan mengantisipasi bagaimana kelompok teroris mengeksploitasi konflik politik.***

Referensi

- Al-Chaidar. *Pemikiran politik proklamator negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo: fakta dan data sejarah Darul Islam*. Darul Falah, 1999.
- Beck, Colin J., and Emily Miner. "Who gets designated a terrorist and why?." *Social Forces* 91.3 (2013): 837-872.
- Chaidar, Al, and Herdi Sahrasad. "Negara, Islam, dan nasionalisme sebuah perspektif." *Jurnal Kawistara* 3.1 (2013).
- Chaidar, Al. "NOMOKRASI ISLAM UNTUK INDONESIA." *Aceh Anthropological Journal* 4.1 (2020).
- Chaidar, Al. "Terrorism and Islamic Fundamentalism: The Darul Islam's Response Towards Indonesian Democracy, 1949–1982." *a conference on regional workshop on "Contemporary Islamic Movements in Southeast Asia: Militancy, Separatism, Terrorism and Democratisation Process," organized by The RIDEP Institute/FES, Bogor, Indonesia*. 2002.
- Comras, Victor D. "UN Terrorist Designation System Needs Reform." *Perspectives on Terrorism* 2.10 (2008): 10-16.
- Cronin, Audrey K. "The" FTO List" and Congress: Sanctioning Designated Foreign Terrorist Organizations." LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON DC CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 2003.

- Cronin, Audrey K., et al. "Foreign terrorist organizations." LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON DC CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 2004.
- Freedman, Benjamin. "Officially blacklisted extremist/terrorist (support) organizations: A comparison of lists from six countries and two international organizations." *Perspectives on Terrorism* 4.2 (2010): 46-52.
- Gross, Joshua. "TALKING WITH TERRORISTS: TERRORIST GROUPS AND THE CHALLENGE OF LEGITIMIZATION." *Journal of Public & International Affairs* 21 (2010).
- Jarvis, Lee, and Tim Legrand. "The proscription or listing of terrorist organisations: Understanding, assessment, and international comparisons." (2018): 199-215.
- Nichols, Grant. "Repercussions and recourse for specially designated terrorist organizations acquitted of materially supporting terrorism." *The Review of Litigation* 28.1 (2008): 263.
- Nurdin, Abidin, et al. *GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA*. Madani Press, 2020.
- Phillips, Brian J. "What is a terrorist group? Conceptual issues and empirical implications." *Terrorism and Political Violence* 27.2 (2015): 225-242.
- Sahrasad, Herdi, and Al Chaidar. "Radicalism, Fundamentalism and Terrorism in Indonesia: A Political Reflection." *Journal of Asia Pacific Studies* 5.2 (2019).
- Sahrasad, Herdi, et al. "Osama and The Entry of Al Qaeda to Southeast Asia in Historical Perspective: A Preliminary Note." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2.2 (2019): 7-21.
- Tabrani, Dedy, Al Chaidar, and Herdi Sahrasad. *Globalism, Terrorism and Islamism in Southeast Asia*. Madani Press, 2020.